



## **PKS DAN NEGARA SYARIAH**

### **Sebuah Evolusi Politik Menuju Negara Islam Indonesia**

**Ida Rochmawati**

STIT Raden Santri Gresik

Ida2rahma@gmail.com

**Abstract:** *This paper will explore the political ideology of PKS in realizing the ideals and goals of the party in an evolutive way, how the implementation of PKS political ideology is done gradually and programmed to achieve a political success. With ideological approach this article try to explain the shift of PKS ideology from year to year slowly but surely has gained a position well established in the map of politics in Indonesia and long-term struggle in realizing the ideology of shariā implementation, although in its journey there are various frictions that erode the eshtablishment of ideology. This is inseparable from the implementation of ideology and movement strategy that was built carefully. From the tarbiyah movement that characterized the party then turned into a social movement and party that has militant cadres ranging from grassroot level to who are in a strategic position. PKS is born from the spirit of deep-rooted Islamism. Its existence is not due to the political influence of great figures that surround it, but born from the spirit of young people who aspire to the implementation of Islamic shariā in socio-political life in Indonesia. of course these ideals are not born just like that. There is a major influence of the Islamic world outside Indonesia that helped shape and formulate the ideas of Islamism.*

**Keywords :** *ideology, shari'ah country, evolution of politic*

### **PENDAHULUAN**

Tulisan ini akan mengupas tentang ideologi politik PKS dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan partai secara evolutif, bagaimana implementasi ideologi politik PKS dilakukan secara bertahap dan terprogram hingga mencapai sebuah keberhasilan politik. Dengan pendekatan ideologis artikel ini berusaha memaparkan pergeseran ideologi PKS dari tahun-ke tahun yang secara perlahan namun pasti telah memperoleh posisi yang cukup mapan dalam peta perpolitikan di Indonesia serta perjuangan jangka panjang dalam mewujudkan ideologi penerapan syariah, meski dalam perjalanannya terdapat berbagai friksi yang mengikis kemapanan ideologi tersebut. Hal ini tidak terlepas dari implementasi ideologi dan strategi gerakan yang dibangun secara matang. Dari gerakan tarbiyah yang menjadi ciri khas partai ini kemudian berubah menjadi sebuah gerakan sosial dan partai yang memiliki kader-kader militan mulai dari tingkat grassroot hingga yang berada dalam posisi strategis. PKS lahir dari semangat islamisme yang mengakar. Keberadaannya bukan karena pengaruh politik tokoh-tokoh besar yang melingkupinya, namun lahir dari semangat kaum muda yang mencita-citakan penerapan syariah Islam



dalam kehidupan sosial politik di Indonesia. Tentu saja cita-cita ini tidak lahir begitu saja. Ada pengaruh besar dunia Islam di luar Indonesia yang turut membentuk dan memformulasi ide-ide islamisme tersebut.

## **AKAR IDEOLOGI POLITIK PKS**

Ideologi secara umum memiliki sebuah konsep tentang masyarakat ideal yang berusaha diwujudkan melalui nilai-nilai yang dipercaya oleh ideologi tersebut.<sup>1</sup> Nilai-nilai itu terkait dengan ---bagaimana memulihkan sebuah kondisi masyarakat yang dirasa tidak atau belum ideal dan pada akhirnya menuju sebuah kondisi ideal di mana sebuah tatanan masyarakat tersebut berada. Dan bagi sebagian besar ideologi, nilai-nilai tersebut tidak hanya diberlakukan pada masyarakat tertentu dan pada saat dan tempo tertentu saja, namun berlaku bagi dan demi sebuah tatanan kemanusiaan terbaik secara universal.

Sementara Politik secara luas berusaha mendamaikan konflik pandangan untuk mencapai keputusan bersama apa yang harus dilakukan. Konflik ini terjadi karena manusia memiliki pandangan dan nilai-nilai berbeda, manusia boleh memiliki pandangan berbeda tentang suatu hal namun terdapat nilai dan pandangan universal yang harus dapat diwujudkan seperti keadilan, kesetaraan dan kebebasan—ini adalah sebuah ideologi. Meski ideologi terkait dengan pertanyaan luas dan mendalam tentang jenis masyarakat terbaik apa yang ingin diwujudkan dan jalan ideal untuk mewujudkannya, namun ideologi juga terikat erat dengan aktivitas politik praktis.

PKS mencoba memilih ideologi politik yang diyakini dapat menjawab semua persoalan yang terjadi di masyarakat Indonesia. Secara jelas dan gamblang dalam AD/ART PKS menyebutkan bahwa Islam menjadi ideologi yang mendasari semua pemikiran dan gerakan politik yang diimplementasikan secara nyata dalam program-program realnya. Islam sebagai ideologi politik menjadi pilihan strategis di tengah carut marut politik Indonesia saat itu, di tahun 1998 saat PKS baru terbentuk, aktivisme keagamaan dirasa menjadi pilihan ideal untuk menjawab semua problem yang ada.

Aktivisme keagamaan menurut Olivier Roy disebut sebagai Islamisme<sup>2</sup>, yang merupakan gerakan Islam kontemporer yang memandang Islam sebagai Ideologi Politik. Islamisme berada dalam dua kutub gerakan yang berseberangan antara revolusi dan reformasi. Bagi Kutub revolusi, islamisasi masyarakat mesti dilakukan melalui perebutan kekuasaan. Bagi kelompok ini pendekatan yang digunakan adalah non kooperatif dengan penguasa dan menolak semua sistem politik demokrasi yang dianggap tidak islami. Sementara menurut kutub reformis, gerakan sosial politis mereka untuk reislamisasi masyarakat secara *bottom up*, dari bawah ke atas yang secara lambat laun akan mewujudkan negara Islam. Perbedaan dua kutub ini bukan pada pentingnya negara

---

<sup>1</sup> Ian Adams, *Political ideology Today Second Edition*, (New York, Manchester University Press, 2001), h. 3

<sup>2</sup> Islamisme merupakan seperangkat ideologi yang berkeyakinan bahwa "Islam harus menjadi pedoman bagi segala segi kehidupan manusia, baik sosial, ekonomi, politik, budaya, serta kehidupan pribadi, biasa juga disebut politik Islam. Lihat Sheri Berman. "Islamism, Revolution, and Civil Society". *Perspectives on Politics* 1 (2) 2003: hal. 258.



Islam, karena keduanya sama-sama sepakat untuk mewujudkan *al iqāmah al –daulah al-islāmiyah* (pendirian negara islam). Perbedaan keduanya terletak pada strategi pencapaian dan sikap mereka terhadap kekuasaan yang ada.<sup>3</sup>

Salah satu ciri Islamisme reformis adalah meski bergerak pada aktivisme mereka bergerak pada skala besar dalam batas legalitas pemerintah. Karena menyadari bahaya sikap konfrontatif dengan penguasa, mereka mengambil langkah konformis dan melakukan gerakan-gerakan secara bertahap untuk menciptakan kesadaran beragama di kalangan masyarakat, sambil terus mendorong upaya penerapan syariah Islam oleh negara.<sup>4</sup> Dalam upaya menegakkan syariat kelompok ini menunjukkan fleksibilitas serta kesiapannya dalam mengadaptasi berbagai kebijakan, ideologi-ideologi dan program-program mereka dalam kehidupan modern.<sup>5</sup>

Dan PKS mengadopsi tipologi Islamisme reformis ini. Secara nyata PKS berusaha masuk dalam politik praktis, mengikuti arus reformasi yang terjadi di Indonesia. Meski seringkali kritis dalam beberapa hal, PKS hampir tidak pernah melakukan gerakan konfrontatif terhadap segala kebijakan pemerintah. Penegakan syariah dilakukan melalui berbagai gerakan penyadaran beragama di tingkat bawah secara sistematis pendidikan masyarakat lewat gerakan tarbiyah yang diselenggarakan dalam berbagai level dan bentuk tahap demi tahap.

Kegiatan Tarbiyah, sebagai wadah dan sarana kaderisasi PKS dapat dikatakan sebagai sebuah proses sosialisasi politik keagamaan karena dengan mengikuti kegiatan tarbiyah, baik sebelum dan setelah berdirinya PKS, memungkinkan individu untuk mendapatkan pengetahuan dan orientasi politik disamping mendapatkan pengetahuan agama. Konsep tarbiyah yang dikembangkan PKS tidak lepas dari gerakan *Ikhwān al Muslimin* di Mesir.<sup>6</sup> Sebagaimana konsep -- Islam adalah agama sekaligus negara (*dīn wa dawlah*) yang artinya Islam menolak sekularisme, Islam agama dan negara itu sendiri.

Hal ini pun diakui oleh Nur Hasan Zaidi, dimana PKS dalam perjalanannya, memilih gerakan tarbiyah sebagai model. Pola gerakan ini tidak hadir dengan tiba-tiba, tapi telah dirintis oleh anak-anak muda sekitar tahun 80-an. Gerakan tarbiyah sebagai sarana yang paling efektif untuk melakukan introspeksi dan penyadaran Islam terhadap generasi muda; menumbuhkan semangat berdakwah sambil belajar menghadapi kediktatoran orde baru; mengajak ke jalan dakwah, dengan menghindari lawan arus terhadap orang yang belum mengapresiasi Islam.

Ciri khas gerakan tarbiyah ini adalah membentuk *halaqah-halaqah* (kelompok-kelompok) kecil yang terdiri dari lima hingga dua belas orang anggota (*mutarabbi*) dibimbing oleh seorang *murabbi* bahkan dalam realisasinya satu atau dua orang anggota pun jadi untuk dikader dan dibina sehingga memiliki wawasan keislaman yang kuat. Contoh lainnya dari proses kaderisasi dan regenerasi dalam tubuh PKS yaitu dengan

<sup>3</sup> Olivier Roy, *Gagalnya Politik Islam*, (Jakarta, Serambi Ilmu: 1996), hal.29

<sup>4</sup> M.Imdadun Rahman, *Ideologi Politik PKS, dari masjid Kampus ke Gedung Parlemen*, (Yogya, LKIS: 2008) h. 72

<sup>5</sup> Karen Armstrong, *Berperang Demi Tuhan* (Jakarta, Serambi: 2001) hal. 349

<sup>6</sup> KH.Abdurrahman Wahid (ed), *Ilusi Negara Islam; Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, (Jakarta, The Wahid Institute, 2009), h.181

melaksanakan pelatihan-pelatihan dan kegiatan-kegiatan/Daurah. Dari berbagai jenis *daurah* tarbiyah (sarana untuk membekali peserta tarbiyah dengan pengalaman untuk pengembangan keahlian dan pengetahuan), terdapat *daurah* yang merupakan kegiatan sosial-politik misalnya *daurah* penyelenggaraan/ pengawasan pemilu dan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (RT, RW, Badan Desa, LSM).<sup>7</sup>

Gerakan dakwah tarbiyah ini juga memberikan materi saluran politik yang bertujuan agar peserta tarbiyah dapat mengetahui hak-hak sosialnya dalam dunia politik, membandingkan beberapa saluran politik untuk melihat kelebihan, kesamaan, dan kekurangannya dengan objektif, memilih saluran politik dengan benar yang sesuai dengan aspirasinya, dan terlibat aktif untuk menyalurkan ide-idenya dalam memperbaiki masyarakat pada saluran politik yang dipilihnya.

Pada awal tahun 1998, tepatnya 20 Juli 1998, kader-kader gerakan tarbiyah mendirikan partai politik Islam yaitu Partai Keadilan (PK) yang kemudian berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di tahun 2001. Meski telah bertransformasi menjadi partai politik, metode pembinaan yang digunakan PKS tetap mengacu pada sistem pengkaderan dakwah tarbiyah, karena inilah yang menjadi kekuatan PKS. Meski pada awalnya lahir dari sebuah gerakan penyadaran keagamaan yang dicetuskan sekelompok anak muda yang menginginkan penyadaran ajaran keagamaan secara universal dalam kehidupan termasuk politik. PKS yang dikenal sebagai partai dakwah atau jamaah tarbiyyah telah mencoba mengimplementasikan dan mensenyawakan sistem ini dengan jargonnya *al hizb huwal jamā'ah wal jamā'ah hiyal hizb* (partai adalah jamaah dan jamaah adalah partai).<sup>8</sup>

## IDEOLOGI POLITIK PKS DAN PENERAPAN SHARIAH

Meski secara tegas PKS tidak memplokamirkan berdirinya negara Syari'ah di Indonesia, namun secara ideologis PKS berusaha menerapkan syariah dalam setiap agendanya. Shadanand Dhume mensinyalir PKS sebagai salah satu musuh dalam selimut demokrasi di Indonesia.<sup>9</sup> Meski secara eksplisit PKS mendukung demokrasi dengan terlibat secara langsung dalam sistem demokrasi di Indonesia, namun mereka memiliki taqiyah politik<sup>10</sup> yang diusung. Terlihat jelas dalam dokumen AD/ART PKS yang secara tegas menyebut pada Bab I pasal 2 bahwa "*partai Berasaskan Islam*".<sup>11</sup> Tentu secara gamblang ini menunjukkan bahwa Islam menjadi platform dan ideologi politik partai ini, di mana aktivisme politik secara nyata dibingkai oleh nilai-nilai Islam. Sebuah kenyataan baru di tengah negara Indonesia hadir parpol berasaskan Islam yang sebelumnya tidak

<sup>7</sup> Tim Kaderisasi PKS, *manajemen Tarbiyah Anggota Pemula* (Jakarta, DPP PKS Departemen Kaderisasi&Syamil Cipta Media, 2004)

<sup>8</sup>Nur Hasan Zaidi, *Dakwah dan Politik*, <http://www.nurhasanzaidi.com/artikel/dakwah/dakwah-dan-politik/>, akses tanggal 23 April 2017

<sup>9</sup> Sadanand Dhume, "Indonesian Democracy's Enemy Within", 1 Desember 20015, <http://yaleglobal.yale.edu/content/indonesian-democracys-enemy-within> akses tanggal 12 Juni 2017

<sup>10</sup> Tentang taqiyah politik PKS, lihat lebih jauh tulisan Abu Rokhmad, " Dasar Negara dan Taqiyah Politik PKS", *Walisono Volume 2 Nomor 1*, Mei tahun 2014.

<sup>11</sup> Situs resmi PKS, <http://pks.id/content/ad-art-pks>, akses tanggal 23 April 2017



bisa diterima karena dianggap bertentangan dengan dasar negara pancasila Secara formal PKS memang tidak terang-terangan mengkampanyekan berdirinya negara syari'ah seperti halnya HTI, namun melalui serangkaian strategi berupaya menerapkan syariah dalam berbagai sistem pemerintahan, kebijakan maupun perundang-undangan. Meski seringkali PKS terbentur dan terjebak dinamika politik yang ada, larut dalam arus politik ketika wakil-wakilnya yang duduk di anggota Dewan yang tersandung kasus korupsi.

Garis ideologi PKS bukanlah asli dari penggalian dimensi fundamentalisme politik Islam yang menyebarkan di Indonesia, melainkan dari adaptasi yang diambil dari Timur Tengah. Ada dua latar belakang yang dominan dari jaringan internasional yang dikembangkan oleh garis ideologi fundamentalisme politik Islam. *Pertama*, transmisi gagasan secara langsung dari Timur Tengah ke Indonesia karena Asia Tenggara menjadi wilayah intelektual pinggiran dalam dunia Islam. Transmisi ini diikuti dengan mengalirnya wacana dominan yang menguasai struktur politik informal PKS, disamping itu dukungan dan aliran dana yang membantu sayap politik PKS dalam bentuk kerjasama mutualisme juga dilakukan.

*Kedua*, transmisi Islam ke Indonesia mempunyai faktor penarik dan pendorong dengan banyaknya pelajar yang menuntut ilmu di Timur Tengah dan beberapa pemerintahan dan lembaga donor di sana memberikan dukungan bagi segala macam usaha pengembangan Islam yang sesuai dengan kondisi di timur tengah.<sup>12</sup> Namun, Tidak semua sarjana yang belajar di Timur Tengah masuk ke dalam PKS<sup>13</sup>

PKS telah mengadopsi Islam sebagai ideologi Partai dan di dalam platformnya secara jelas memasukkan dan mempromosikan sebuah pendekatan islam ke dalam politik indonesia.<sup>14</sup> PKS mendeskripsikan diri sebagai partai Dakwah yang berarti tujuan utamanya adalah mempromosikan Islam.<sup>15</sup> Di sisi lain tujuan PKS adalah untuk memperkenalkan syari'ah secara gradual melalui perubahan legislasi hukum. Tujuan ini tentu saja bertentangan dengan sekularisme yang secara umum membutuhkan demokrasi dalam implementasi politik. Meski Syariah juga mempertanyakan tentang perlindungan hak-hak asasi manusia dan kesempatan yang sama dalam partisipasi politik.

Di Indonesia upaya penerapan shari'ah ini mengalami berbagai kendala dan tantangan bahkan kegagalan karena memang tidak sejalan dengan kesejarahan bangsa Indonesia membentuk NKRI. Sepanjang sejarah Indonesia upaya penerapan shari'ah sejak DI/TII hingga NII mengalami kegagalan akibat sikap oposisi dan konfrontatif dengan penguasa. Upaya penerapan syariah secara legal formal di Indonesia dianggap sebuah mimpi karena formalisasi shari'ah bertentangan dengan kultur dan sejarah panjang NKRI.

---

<sup>12</sup> A.Bubalo & Fealy G., *Joining The Caravan? The Middle East, Islamism, and Indonesia* (Alexandria, The Lowy Institute for International Policy, 2005) h. 159

<sup>13</sup> M. Faisal Aminuddin, "Reorganisasi PKS di Indonesia, *Jurnal Studi Pemerintahan Volume 1 Nomor 1 Agustus 2010, hal. 135.*

<sup>14</sup> Lidya Trotter, *Islam, Women, and Indonesian Politics, The PKS Challenge to Substantive Theories of Democracy* (Thesis, Departement Of Indonesia Studies, The University of Sidney, 2006) h.10

<sup>15</sup> Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia* (Jakarta, Teraju, 2001), h.228

PKS menyadari betul hal ini, sehingga implementasai ideologi politik dicapai melalui strategi dan pendekatan yang relatif lunak, konformis dan transformatif, berusaha berdamai dengan kultur dan kebijakan yang ada. Kenyataan bahwa realisasi kebijakan Islam seperti pemberlakuannya sebagai konstitusi masih gagal di Indonesia serta kondisi selama pasca kemerdekaan politik Islam selalu ditekan oleh penguasa. Ini menjadi pelajaran penting bagi PKS dalam menyusun ideologi politiknya dan strategi perwujudannya.

PKS mengangkat *sharia* sebagai modalitas yang dijual pada konstituennya, yang berarti PKS harus memformulasikan *sharia* untuk kelihatan berbeda, minimal dalam segi kemasannya agar tidak mengulang kesalahan dan kegagalan di masa lalu. PKS bisa sangat diuntungkan karena sistem demokrasi menjamin tiadanya tekanan penguasa atas politik Islam sekalipun sudah terang-terangan menjadikan Islam sebagai asas Partai dan tujuannya menegakkan *sharia* dalam NKRI.

Ideologisasi PKS dilakukan dengan dua strategi besar, *pertama*, penyebaran gagasan islam yang dikemas secara apik yang berlaku untuk masyarakat umum. Gagasan-gagasan penerapan islam secara kafah dalam kehidupan diimplementasikan dengan menyelenggarakan program-program yang disusun dengan seksama terkait kehidupan/penerapan ibadah seperti melakukan training keislaman di sekolah-sekolah, “*islamic training for beginner*, kajian fiqih, bimbingan dan belajar, kursus-kursus pelajar dan mahasiswa. Memberikan ceramah-ceramah gratis, menyediakan khatib siap pakai, pembinaan anak-anak TK-SD, mendirikan TK-IT yang berjumlah ratusan yang bersaing dengan TK-ABA –Aisiyah, Raudlatul Athfal milik muslimat NU, SDIT yang bersaing dengan SDNU dan SD Muhammadiyah, memberi kursus pada ibu-ibu rumah tangga, (ke rumah-rumah), mengisi pegajian-pengajian di RT-RW, mushollah, mengadakan diskusi pendidikan anak dengan ibu-ibu di lingkungan, penterjemahan buku-buku berbahasa Arab yang seideologi (*ikhwanul muslim*) dan penerbitan buku-buku islam.<sup>16</sup>

Kegiatan-kegiatan tersebut dikemas menarik dan hampir tidak ada beda dengan pengajian-pengajian atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan NU, sehingga banyak orang tertarik untuk mengikutinya. Kegiatan-kegiatan ini bahkan mengambil alih peran dakwah yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan NU dengan mengambil tempat kegiatan di basis kegiatan Muhammadiyah dan NU. Tanpa disadari sepenuhnya oleh masyarakat, di tengah kajian keagamaan yang diberikan seringkali terselip agenda politik. Secara bertahap namun pasti wawasan ideologi masyarakat digiring kepada pentingnya upaya penerapan syariah, dengan berupaya membangun opini bahwa PKS sebagai wadah dalam membangun masyarakat yang bermartabat, memiliki nilai-nilai moralitas (etika) tinggi, dengan menegasikan nilai-nilai moralitas yang selama ini telah ada, tidak lagi relevan di Indonesia.

*Kedua*, strategi kaderisasi, ini dilakukan dengan melakukan training-training secara intensif untuk semua kalangan, mulai anak-anak, remaja, dan mahasiswa. Studi islam intensif, Latihan Mujahid Dakwah dan training untuk peminat, dilakukan secara

---

<sup>16</sup> Zuly Qadir, *Transmisi Gerakan Islam politik di Indonesia*, <http://kabarsumatera.com/2013/11/10/transmisi-gerakan-islam-politik-di-indonesia/amp/> akses 23 April 2017



berjenjang dan benar-benar intensif. Tidak heran jika PKS menyediakan pendidik-pendidik Iqra; untuk anak-anak, remaja, Guru TK, SD. SMP sampai juru masak untuk ibu-ibu dan remaja muslim di lingkungan Muhammadiyah atau NU.<sup>17</sup> Sejak tahun 1990-an sistem gerakan tarbiyah mengalami perkembangan yang tidak disangka-sangka, seperti mengadakan pertemuan-pertemuan (*liqa*), *dauroh*, *rihla* (wisata), *mabit* (kegiatan malam), *mukhoyyam* (berkemah), seminar, bedah buku dll. Dengan doktrin sebagai gerakan dakwah *islam amar ma;ruf nahi munkar*, maka umat Islam dari berbagai kalangan akan mudah menerimanya karena konsep tersebut sangat islami.

Sebagai partai politik yang lahir pascareformasi, Visi misi PKS masih menduakan Pancasila. Platform PKS tidak mengingkari Pancasila sebagai dasar negara, namun pikiran dan tindakan para kadernya condong mendukung gagasan *khilāfah islāmiyyah* atau penerapan syariat Islam. Simbol-simbol kebangsaan juga jarang ditemukan di kantor-kantor PKS. Secara diam-diam maupun terbuka PKS masih konsisten memperjuangkan sikap fundamentalistik,<sup>18</sup> meski di AD/ART maupun di berbagai kesempatan dikemukakan bahwa PKS sebagai partai terbuka. Pada tingkat praktis sangat idealis namun di tingkat ideologis PKS cenderung radikal dengan menampakkan dukungan secara serius terhadap penerapan Perda bernuansa Shari'ah.<sup>19</sup>

## STRATEGI POLITIK PKS

Ada dua strategi politik yang dipakai PKS, *pertama* gerakan horizontal dan *kedua* gerakan vertikal. Strategi horisontal ditegaskan PKS sebagai partai Dakwah dalam platformnya

“Strategi PK Sejahtera sebagai Partai Dakwah (*khuthuth ‘āridhah*) dalam transformasi bangsa, adalah *gerakan kultural* (strategi mobilisasi horizontal/*ta’bīah al afāqiyah*) dan *gerakan structural* (strategi mobilitas vertikal/ *ta’bīah al amudiyah*).<sup>20</sup>

Mobilisasi horizontal dilakukan dengan penyebaran kader dakwah ke berbagai kalangan dan lapisan masyarakat untuk menyiapkan masyarakat agar mereka menerima *manhaj* Islam serta produk kebijakan yang Islami. Kader dakwah yang disebar akan memberikan tarbiyah pada masyarakat secara luas melalui berbagai kegiatan dakwah informal di masyarakat dan melalui sistem pendidikan yang dibangun secara masif di Indonesia. Mobilisasi horisontal ini menyasar masyarakat di tingkat *grass root* secara luas

<sup>17</sup> Strategi PKS ini sebenarnya juga telah meresahkan Muhammadiyah dan NU, dengan memasuki wilayah kedua ormas ini masyarakat akan menganggap bahwa PKS menjadi bagian Muhammadiyah dan NU, sehingga banyak warga Muhammadiyah dan NU tertarik dan masuk menjadi anggotanya. Lebih jauh kegiatan yang mereka lakukan di basis Muhammadiyah dan NU juga secara perlahan memperluas wilayah politiknya.

<sup>18</sup> Andrew Steele, “The Decline of Political Islam in Indonesia,” dalam *Asia Times Online Ltd.*, seperti dikutip Burhanuddin Muhtadi, *Dilema PKS...*, h. 9.

<sup>19</sup> Wahid, *Ilusi...*, h. 138

<sup>20</sup> Dewan pengurus pusat PKS, *Falsafah Dasar Perjuangan Dan Platform Kebijakan Pembangunan PKS*, lihat <http://pks.id/content/falsafah-dasar-perjuangan-dan-platform-kebijakan-pembangunan-pks>, akses 24 April 2017

dan menyentuh semua kalangan, laki-laki dan perempuan, anak-anak dan remaja. Ibu rumah tangga hingga pegawai, pelajar hingga mahasiswa, kalangan miskin hingga kaya, masyarakat pedesaan hingga perkotaan. Hasilnya memang luar biasa. Strategi mereka sudah banyak mempengaruhi masyarakat di berbagai lapisan.

Sedangkan yang *kedua*, Mobilisasi vertikal adalah penyebaran kader dakwah ke berbagai lembaga yang menjadi *mashādirul qarar* (pusat-pusat kebijakan), agar mereka dapat menterjemahkan konsep dan nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan-kebijakan publik. Di berbagai lembaga pemerintahan kader-kader PKS akan mencari pengaruh sehingga mereka secara perlahan dapat mempengaruhi bahkan menguasai kebijakan di berbagai lembaga-lembaga strategis. Ini tidak hanya dilakukan dalam instansi pemerintah namun juga pada lembaga-lembaga strategis seperti lembaga pendidikan dan perguruan tinggi.

Dengan format perjuangan seperti di atas, maka arah perjuangan umat PKS akan mengambil bentuk: *pertama*, Islamisasi secara struktural dan kultural. Umat Islam Indonesia berhak melaksanakan Islamisasi kehidupan baik secara struktural maupun kultural—dalam maknanya yang positif dan obyektif. *Kedua*, mengembangkan masyarakat Madanieperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang secara positif dan konstruktif menerima dan menghormati asas pluralitas..<sup>21</sup>

Platform PKS di atas memberikan gambaran real bahwa islamisasi secara struktural dan kultural merupakan agenda penerapan syari'ah dalam struktur politik dan kehidupan bernegara. Islamisasi ini telah diwujudkan PKS dalam berbagai agenda partai maupun gerakan-gerakan sosial. Sementara konsep madani adalah sebuah konsep ideal yang diidamkan oleh kelompok islamis. Dengan kalimat “yang dicontohkan oleh Rasulullah” inilah konsep masyarakat madani dibingkai dalam sebuah negara syari'ah.

## **EVOLUSI POLITIK PKS DALAM MEWUJUDKAN NEGARA SYARIAH DI INDONESIA.**

Evolusi memang tidak lazim dalam wacana politik praktis, namun teori evolusi yang semula berlaku pada perubahan fisik mahluk hidup sebagai bagian dari upaya adaptasi terhadap lingkungan kemudian diadaptasi pada perubahan sosial. Pengembangan teori evolusi Darwin yang dilakukan oleh Talcot Parson<sup>22</sup> mengatakan bahwa komunikasi menjadi satu hal fundamental dalam seluruh kultur manusia. Ini nampaknya pas dengan model implementasi ideologi PKS. PKS bisa dilukiskan sebagai “gerakan gradual dan evolusioner untuk menegakkan negara Islam di Indonesia ” yang mengutamakan gerakan tarbiyah sebagai bentuk komunikasi efektif untuk mempengaruhi masyarakat.

### **Dari masjid ke panggung politik**

Lahirnya gerakan dakwah kampus yang merupakan cikal bakal kehadiran kader-kader PK di era reformasi berawal dari munculnya kelompok anak muda yang memiliki semangat tinggi dalam mempelajari dan mengkaji serta mengamalkan Islam, sebagai

---

<sup>21</sup> Ibid, hal. 40

<sup>22</sup> Talcot parson mentransformasi teori Darwin ke dalam teori sosial bahwa komunikasi menjadi hal penting perubahan sosial secara evolutif. Lihat lebih jauh Anthony Giddens, *Sociology* (Cambridge, Polity Press : 1994) hal. 651



tanggapan atas tekanan politik yang dilakukan rezim represif orde baru terhadap umat Islam. Adanya ruang publik yang relatif lapang yaitu masjid dan mushalla kampus, tempat idealisme kaum muda Islam itu mengalami persemaian ideal secara tepat. Sementara itu, masjid kampus ialah basis yang dijadikan benteng pertahanan sekaligus basis gerakan dan faktor di atas membuat anak-anak muda bersemangat dalam perjuangan dakwah Islam yang semuanya bermula dari masjid Salman ITB.

Kegiatan pengkajian Islam yang dilakukan para mahasiswa Masjid Salman ITB inilah yang kemudian menjadi *pilot project* bagi berbagai kegiatan keislaman para mahasiswa di universitas-universitas lain di Indonesia seperti UGM, UI, IPB, UNUD, dan lainnya,<sup>23</sup> yang akhirnya diresmikan dalam Lembaga Dakwah Kampus (selanjutnya LDK). Melalui LDK inilah ide-ide dan pemikiran Ikhwanul Muslimin dikaji dan diimplementasikan.

Akhirnya melalui sebuah proses panjang, para pegiat dakwah inipun mendeklarasikan sebuah partai politik yang diberi nama Partai Keadilan (PK), yang dideklarasikan pada hari Ahad 15 Rabi'ul Tsani 1419Hijriah yang bertepatan dengan 19 Agustus 1998, walaupun sebenarnya PK didirikan pada 20 Juli 1998. PK yang pada pemilu 1999 mendapatkan 1,4 juta suara atau 1,36 % ini berhasil mendudukkan 7 orang wakilnya di Senayan. PK menempati 7 besar partai pemenang pemilu 1999. Pada Pemilu 2009 yang mendapatkan suara 7,88%, bagi PKS merupakan simbol keberhasilan pelembagaan parpol dalam masyarakat dan menunjukkan perkembangan politik yang cukup signifikan. Jika parpol yang berbasis Islam mengalami kemerosotan suara yang tajam seperti PKB, PPP, PBB dan PBR, maka PKS mampu membangun lembaganya dengan ideologi dan disiplin partai yang tegas, kader yang jujur, militan dan terpelajar.

Sebagai partai yang mendeklarasikan dirinya sebagai partai kader, PKS memiliki sistem kaderisasi kepartaian yang sistematis dan metodik. Kaderisasi ini memiliki fungsi rekrutmen calon anggota dan fungsi pembinaan untuk seluruh anggota, kader dan fungsionaris partai. Fungsi-fungsi ini dijalankan secara terbuka melalui infra struktur kelembagaan yang tersebar dari tingkat pusat sampai tingkat ranting yang mengimplementasikan konsep syariah alam seluruh gerakan politiknya menyimpan agenda penerapan syariah secara transformatif bukan formalistik.

### **Dari pengajian ke ideologi politik**

Dalam landasan filosofis Partai Keadilan Sejahtera itu terdapat penegasan bahwa Islam merupakan kaca mata pandang untuk memahami realitas politik maupun untuk membangun strategi-strategi cerdas perjuangan politik. Partai ini hendak membuktikan kebenaran sebuah aksioma dalam dunia politik bahwa Islam merupakan agama universal yang mencakup seluruh aspek kehidupan dengan berbagai dimensinya yang kompleks.

Dengan kata lain Islam dalam konsepsi para aktifis Partai Keadilan Sejahtera adalah sebuah sistem hidup yang universal, mencakup seluruh aspek kehidupan. Islam adalah negara dan tanah air, pemerintahan dan umat, moral dan kekuatan, rahmat dan keadilan, kebudayaan dan perundang-undangan, ilmu dan peradilan, materi dan sumber daya alam, usaha dan kekayaan, jihad dan dakwah, tentara dan fikrah, akidah yang lurus dan ibadah yang benar.

---

<sup>23</sup> Ibid, h.71

Tidak hanya persoalan politik yang berelasi dengan negara, PKS dalam mengemas dakwahnya juga memiliki tema-tema praktis, dari yang sederhana sampai yang berat. Semisal memilih pasangan, hidup bersih dan sehat, makan dan minum Rasulullah, pentingnya kerja kolektif (*amal jamā'i*), menutup aurat, *ghirah* pada keluarga dan agama, perjalanan dakwah kaum muda, dakwah di negeri-negeri Muslim, menghafal *hadits arba'in* dan surat-surat pendek dalam Al- Qur`an, sebagai bentuk *ghazw al-fikr* (perang ideologi), gerakan terselubung yang memusuhi Islam, lembaga-lembaga yang menentang Islam, sistem politik dan hubungan internasional, hak asasi manusia, dan lain sebagainya.

Syariat Islam ditegakkan melalui praktik riil seperti masalah sholat wajib dan sunnah puasa wajib dan sunnah, mengenakan jilbab, menjauhkan makanan dan gaya hidup haram bahkan yang ragu-ragu ditinggalkan. Mungkin itu sebabnya gerakan tarbiyah (PKS) yang pada awalnya hanya dianggap sebagai gerakan pinggiran dan gerakan eksklusif kini telah berubah menjadi gerakan *mainstream* di tengah-tengah kehausan masyarakat akan Islam.

Secara perlahan namun pasti PKS telah berhasil melakukan transformasi politik yang berkembang secara bertahap dan menemukan momentum dalam sebuah situasi masyarakat mengalami kebingungan politik. Konsep penerapan shari'ah secara transformatif dalam setiap lini kehidupan menjadi menarik bagi masyarakat dibanding formalitas negara syariah yang pasti akan menimbulkan kofrontasi politik dan agama, akhirnya tujuan PKS adalah negara syari'ah dalam bingkai NKRI

## KESIMPULAN

Ideologi politik PKS sebagai salah satu partai politik di Indonesia secara jelas mencatumkan Islam sebagai ideologi politiknya. Ini jelas menentang arus politik yang selama ini ada di Indonesia. Meski dalam AD/ART dicantumkan bahwa PKS adalah partai yang berada dalam naungan NKRI, akan tetapi mengusung Islam sebagai ideologi menegaskan agenda politik jangka panjang –penerapan konsep shari'ah dalam kehidupan politik, bernegara dan bermasyarakat.

Tujuan ini dicapai melalui berbagai implementasi ideologis secara gradual, dengan menganut politik evolutif ---mencapai tujuan secara perlahan namun pasti. Strategi PKS untuk mewujudkan cita-cita politiknya ditempuh secara horisontal dan vertikal, menanamkan kekukuhan aqidah keberagamaan dan penerapan syariah dalam kancah perpolitikan untuk mempengaruhi kebijakan yang ada. Selama 20 tahun lebih PKS telah berhasil melakukan evolusi politik dengan menguasai kalangan muda melalui kegiatan tarbiyah di masjid sampai mereka memperoleh kesadaran politik dan menguasai perpolitikan saat ini. Menguasai masyarakat bawah dengan memberikan wacana alternatif di tingkat *grassroot* sehingga masyarakat memiliki pandangan keagamaan yang sama dengan tujuan politik PKS. Sementara secara vertikal, para kader memasuki dan mempengaruhi struktur formal dan nonformal dalam berbagai bidang, pemerintah dan nonpemerintah. Lambat laun PKS menyiapkan seluruh kader di tingkat *grassroot* maupun secara massif mewujudkan tujuan partai jangka panjang yaitu membangun negara syariah dalam bingkai NKRI. □



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan jurnal

- Adams, Ian. (2001). *Political Ideology Today Second Edition*, New York, Manchester University Press.
- Aminuddin M. Faisal, "Reoganisasi PKS di Indonesia, *Jurnal Studi Pemerintahan Volume 1 Nomor 1 Agustus 2010*
- Amstrong, Karen. (2001). *Berperang Demi Tuhan*, Jakarta, Serambi 2001.
- Berman, Sheri. (2003). "Islamism, Revolution, and Civil Society". *Perspectives on Politics* 1 (2).
- Bubalo A. & Fealy G., (2005). *Joining The Caravan? The Midle East, Islamism, and Indonesia*, Alexandria, The Lowy Institute for International Policy.
- Damanik Ali Said,. (2001). *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, Jakarta, Teraju.,
- Giddens, Anthony. (1994). *Sociology*, Cambridge, Polity Press.
- Rahmat, M. Imdadun. (2008). *Ideologi Politik PKS, dari Masjid Kamus ke Gedung Parlemen*, Yogya, LKIS.
- Roy ,Olivier. (1996). *Gagalnya Politik Islam*, Jakarta, Serambi Ilmu.
- Steele, Andrew, "The Decline of Political Islam in Indonesia," dalam *Asia Times Online Ltd*.
- Tim Kaderisasi PKS,. (2004). *manajemen Tarbiyah Anggota Pemula*, Jakarta, DPP PKS Departemen Kaderisasi&Syamil Cipta Media.
- Trotter, Lidya. (2006). *Islam, Women, and Indonesian Politics, The PKS Challenge to Substantive Theories of Democracy*, Thesis, Departement Of Indonesia Studies, The University of Sidney.
- Wahid, KH.Abdurrahman (ed). (2009). *Ilusi Negara Islam; Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, Jakarta, The Wahid Institute.

### Internet

- Dhume,Sadanand "Indonesian Democracy's Enemy Within", 1 Desember 2015, <http://yaleglobal.yale.edu/content/indonesian-democracys-enemy-within> akses tanggal 12 Juni 2017
- Platform PKS, <http://pks.id/content/falsafah-dasar-perjuangan-dan-platform-kebijakan-pembangunan-pks>, hal.38
- Situs resmi PKS, <http://pks.id/content/ad-art-pks>, akses tanggal 23 April 2017
- Qadir, Zuly *Transmisi Gerakan Islam politik di Indonesia*, <http://kabarsumatera.com/2013/11/10/transmisi-gerakan-islam-politik-di-indonesia/amp/> akses 23 April 2017
- Zaidi, Nur hasan, *dakwah dan Politik*, <http://www.nurhasanzaidi.com/artikel/dakwah/dakwah-dan-politik/>, akses tanggal 23 April 2017